

PROSPEK PENEGAKAN DAN PENGHORMATAN HAM DALAM ERA EFORMASI MENUJU MASYARAKAT MADANI

Divisi Hukum dan HAM CIDES

Memasuki era baru reformasi saat ini, kita dihadapkan dengan berbagai persoalan mendasar berbangsa dan bernegara. Persoalan HAM menjadi salah satu *significant point* yang segera harus menjadi perhatian bersama seluruh komponen bangsa. Berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi belakangan ini mengindikasikan adanya kecenderungan baru meluasnya pelanggaran HAM yang tidak hanya bersifat vertikal akan tetapi juga pelanggaran HAM yang bersifat horizontal. Dengan kata lain, bahwa pelaku pelanggaran HAM yang sedang marak saat ini dilakukan oleh masyarakat sipil yang telah kehilangan rasa kemanusiaannya. Hal ini berbeda dengan yang terjadi pada masa Orde Baru berkuasa, di mana pada waktu itu yang dianggap agen satu-satunya pelanggaran HAM dilakukan oleh rezim penguasa Orde Baru yang

secara sistematis merupakan ancaman bagi kehidupan rakyat sipil.

Menonjolnya pelanggaran HAM secara horizontal ini dalam banyak kasus di Indonesia tidak bisa dilihat begitu saja terlepas dari pelanggaran HAM secara vertikal masa lalu. Sebab ada banyak kasus yang terjadi saat ini dilatarbelakangi oleh faktor-faktor politis yang mengkondisikan masyarakat itu untuk melakukan berbagai pelanggaran HAM. Terutama kebijakan politik di bidang ekonomi yang selama Orde Baru dikenal dengan politik yang berpihak kepada kapitalis-kapitalis besar, sehingga terjadi kesenjangan ekonomi yang begitu tajam dan kemiskinan struktural yang sangat parah. Dengan kondisi yang seperti inilah rakyat yang telah merasakan adanya ketidakadilan itu semakin kehilangan kesabaran dan kendali diri, sehingga begitu ada kesempatan seperti

kasus-kasus yang terjadi belakangan ini, maka tidak bisa dihindarkan lagi bahwa kerusuhan-demi kerusuhan massa pun terjadi hingga sampai ketinggian yang sangat memprihatinkan. Selain itu juga pelanggaran HAM secara horizontal dimungkinkan karena adanya faktor rekayasa politik oleh pihak-pihak elite tertentu dengan menggunakan konspirasi politik dengan ciri gerakannya selalu melibatkan kekuatan massa untuk tujuan-tujuan kekuasaan mereka. Pola seperti ini sebenarnya sangat kental terjadi pada masa Orde Baru, di mana pada waktu itu mengesankan semuanya bisa saja direkayasa dengan kekuasaan. Kekuasaan dipaksakan menjadi sebuah kebenaran dan berbagai tindakan pelanggaran HAM selalu dibenarkan dengan alasan politik demi stabilitas nasional, demi persatuan dan kesatuan bangsa, demi mempertahankan pemer-

intahan yang sah dan sebagainya yang lazim dijadikan kata kunci bagi pembenaran tindakan pelanggaran HAM tersebut.

Pelanggaran HAM dengan cara-cara kekerasan yang ternyata masih marak terjadi di dalam reformasi ini pada hakikatnya dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu *Pertama*; pelanggaran HAM secara vertikal atau terjadi karena adanya konflik vertikal, biasanya kental dengan isu-isu politik dan juga berkaitan dengan unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat, seperti dalam kasus Semanggi tanggal 13-14 Nopember 1998 dan kasus-kasus serupa yang juga terjadi di beberapa daerah lainnya di Indonesia. *Kedua*; pelanggaran HAM secara horizontal atau terjadi karena adanya konflik horizontal, biasanya kental dengan isu-isu SARA dan premanisme, berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi dan pendidikan, seperti dalam kasus pembunuhan yang berkedok dukun santet atau kini ditambah lagi dengan pembunuhan orang yang diduga "ninja" terjadi di Banyuwangi yang hingga kini telah meluas ke daerah-daerah lainnya. Kemudian tragedi kasus Ketapang tanggal 21-22 Nopember 1998 dan tragedi Kupang tanggal 30 Nopember 1998 yang sangat memprihatinkan, karena secara nyata telah mengancam kerukunan dan kehidupan umat beragama di Indonesia. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam tabel.

Dari tragedi-tragedi itu kita dapat melihat secara jelas, betapa pelanggaran HAM dengan kekerasan telah menjadi suatu "ideologi" atau mentradisi dalam kehidupan bangsa ini. Segala tingkatan pelanggaran HAM dari yang ringan sampai yang terberat secara berulang-ulang terus terjadi dan semakin meresahkan masyarakat. Dalam kondisi yang sangat rawan ini emosi massa pada umumnya sangat mudah terpancing untuk melakukan hal-hal yang bersifat destruktif dan menimbulkan kerusuhan masal yang tak terkendali. Bahkan yang sangat memprihatinkan adalah menggejalanya suatu tindakan yang menjurus kepada mudahnya orang atau sekelompok orang mempermainkan nyawa orang lain. Dengan kata lain bahwa dalam kondisi yang rusuh itu nyawa manusia dianggap sangat murah sekali dan tidak ada nilainya. Maka tidak aneh kalau hanya dalam waktu sekejap saja terjadinya kerusuhan, telah banyak mendatangkan korban jiwa manusia dan penghancuran berbagai sarana umum, termasuk tempat-tempat ibadah agama (lihat dalam Tabel di atas). Kenyataan ini menggambarkan bahwa betapa sosok bangsa ini sedang mengalami sakit yang sangat parah disebabkan oleh adanya akumulasi persoalan yang selama kurang lebih 32 tahun terbungkam dan dibungkam oleh kekuatan rezim penguasa Orde Baru. Kini hampir semua aspek kehidupan ber-

bangsa dan bernegara menjadi sangat terpuruk. Keadaan ini lebih tepat untuk dikatakan sebagai musibah nasional bangsa Indonesia yang kita tidak tahu sampai kapan berakhirnya.

Kendati demikian, sebagai bangsa yang beragama dan mayoritas beragama Islam, bangsa Indonesia harus bersyukur kepada Allah Swt bahwa di balik ujian berupa musibah nasional ini, ternyata masih ada gerakan hati nurani, baik dari masyarakat termasuk mahasiswa maupun pemerintah sendiri, untuk berani melakukan langkah-langkah reformasi dengan cara-cara yang benar dan tidak melanggar HAM. Walaupun ternyata masih jauh dari harapan reformasi yang oleh sebagian kelompok masyarakat dikehendaki harus dilakukan secara total dan menyeluruh, sedangkan dari kelompok masyarakat yang lain termasuk pemerintah menghendakinya dilakukan secara gradual atau bertahap, terutama yang berkaitan dengan reformasi politik, namun itu semua tidak perlu menjadi pertentangan fisik yang berakibat melanggar HAM, baik secara vertikal maupun horizontal. Langkah yang paling afdol untuk itu adalah dengan melakukan pendekatan dialogis, kompromi secara demokratis dan membangun kembali sendi-sendi kehidupan masyarakat yang telah rusak dan terpuruk itu. Jangan justeru konflik yang telah ada itu malah dipertajam dengan memasukkan kepentingan-ke-

Tabel
Kasus Pelanggaran HAM dalam Era Reformasi

I. Konflik Vertikal

No	Waktu	Peristiwa	Tempat	Jumlah Korban
1	13 Nopember 1998	Semanggi	Jakarta	448 org terdiri dari : 14 org meninggal, 195 org luka-luka berat, 239 org luka-luka
2	21 Nopember 1998	tuntutan penurunan bendera setengah tiang oleh mahasiswa DPRD	Bengkulu	25 mahasiswa luka-luka 11 Personel PHH Brimob luka-luka dan sejumlah Dalmas luka-luka

I. Konflik Horizontal

No.	Waktu	Peristiwa	Tempat	Jumlah Korban
1	Januari-oktober 1998	Pembunuhan berkedok dukun santet dan orang yang diduga ninja	Banyuangi dan telah menyebar ke daerah lainnya	Banyuangi = 94 org terdiri dari : 84 org meninggal dunia, 3 org luka berat dan 7 org luka ringan
2	22 Nopember 1998	Kerusuhan Ketapang	Jakarta	13 org tewas 12 gereja rusak
3	24 November 1998	Kerusuhan PT. Indorayon Utama, Porsea	Sumatera Utara	2 org luka-luka 23 rumah karyawan dibakar 13 truk dibakar 6 truk dirusak
4	25 Nopember 1998	Kerusuhan Pinrang	Sulawesi Selatan	11 kantor Pemda 1 kantor Golkar 1 kantor PU
5	30 Nopember 1998	Kerusuhan Kupang	Nusa Tenggara Timur	13 org luka-luka 5 masjid dibakar 5 masjid dirusak 23 rumah penduduk dirusak 2 ruko dan 2 rumah makan dibakar dan 23 lainnya dirusak serta 6 seda motor dibakar.
6	2 Desember 1998	Kerusuhan Ciamis	Jawa Barat	Korban dapat dihindarkan

* Data CIDES, Mei - Desember 1998

pentingan politik tertentu yang mungkin itu tidak dipahami oleh masyarakat.

Sebagaimana yang telah menjadi komitmen bangsa ini bahwa kita harus selalu berupaya maksimal menegakkan dan mengormati HAM dalam kondisi apapun, apalagi dalam era reformasi saat ini yang penuh dengan harapan-harapan akan kondisi masa depan Indonesia yang lebih baik. Sebagaimana yang telah disepakati bahwa model kehidupan masyarakat *madani (civil society)* adalah menjadi pilihan harapan kita di masa depan. Dalam konsep masyarakat madani sebagai masyarakat yang beradab, nilai-nilai HAM betul-betul ditegakkan dan dihormati di masyarakat. Dengan penuh kesadaran dan pendalaman terhadap nilai-nilai HAM itu akan tercermin adanya suatu kewajiban asasi manusia untuk selalu menjaga harkat dan martabat kemanusiaan, baik dalam kapasitasnya sebagai warga masyarakat, warga bangsa maupun sebagai warga dunia. Negara dalam pengertian politis harus ditempatkan sebagai suatu kekuatan moral masyarakat yang menjadi benteng bagi tegaknya nilai-nilai HAM dan keadilan sosial. Dalam suasana masyarakat madani itu tidak ada pertentangan moral apalagi fisik yang berakibat pelanggaran HAM antara pemerintah dan masyarakat atau antara sesama masyarakat itu sendiri. Semua komponen bangsa de-

ngan penuh kesadaran selalu teguh bersikap dan berbuat untuk mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dengan melihat kenyataan pelaksanaan HAM di Indonesia saat ini, maka untuk mewujudkan suatu cita-cita masyarakat madani tersebut, agaknya masih terlalu jauh dan harus dimulai dari tahapan-tahapan yang paling mendasar adalah terus menerus melakukan penyamaan visi dan persepsi dan secara sadar melakukan misi-misi pelaksanaan HAM, termasuk mensosialisasikannya kepada seluruh lapisan masyarakat dan aparat penyelenggara negara.

Dalam agenda reformasi, telah secara tegas dinyatakan oleh pemerintah bahwa era reformasi saat ini membawa angin segar bagi kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia. Hal ini berkaitan dengan perubahan paradigma lama ke paradigma baru yang memperkuat tatanan nilai-nilai demokrasi dan HAM bagi kehidupan bangsa Indonesia. Kendati ternyata terdapat banyak hal-hal yang masih mengganjal dalam membangun paradigma baru itu, akan tetapi dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, semakin memberikan kepastian dan harapan bagi masa depan bangsa Indonesia yang lebih beradab dan bermartabat sesuai dengan cita dan citra kehidupan masyarakat madani yang akan

kita capai.

Beberapa Rekomendasi

1. Dalam rangka melaksanakan TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, maka Presiden BJ Habibie segera menerapkan keteladanan sikap dan perilaku menghormati HAM kepada semua aparat pemerintah (aparat penegak hukum, birokrasi dan hankam) dan dengan segera menindak tegas aparat yang melakukan pelanggaran HAM termasuk pejabat atasannya yang bertanggung jawab.
2. Pemerintah segera meningkatkan kemampuan berkomunikasi sosial kepada aparat teknis di lapangan yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat, didasari oleh pemahaman yang memadai terhadap nilai-nilai HAM universal.
3. Pemerintah, melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan segera mensosialisasikan HAM secara kurikulum dan pedagogis kepada generasi sejak dini untuk mendekonstruksi kultur kekerasan masyarakat yang akan datang.
4. Peningkatan pemahaman dan sosialisasi HAM pada masyarakat melalui berbagai forum masyarakat sebagai signifikansi untuk menuju masyarakat madani. ■